

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan desa wisata dalam hal ini adanya peran Kepala desa studi kasus desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul ini tidak terlepas dengan adanya peran kepemimpinan kepala desa sebagai pendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengembangkan wisata Puncak Sosok sebagai desa wisata. Disamping itu perkembangan wisata Puncak Sosok juga berdampak positif bagi kepemimpinan kepala desa dan warga desa Bawuran dimana pada 10 Desember Tahun 2019 wisata Puncak Sosok mendapat penganugrahan penghargaan sebagai desa dengan kategori maju pada lomba desa wisata tingkat nasional dengan masuk nominasi 10 besar mengungguli 158 desa di Indonesia (dppkbpmd.bantulkab.go.id). Penganugrahan penghargaan ini dihadiri kepala DPPKBPMD Kabupaten Bantul ibu Dra. Sri Nuryanti, Msi dalam hal ini diwakili oleh Kabid PMD Bapak Pambudi Arifin R, SIP mendampingi Kepala Desa Bawuran.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdiri dari banyak pulau yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Di mana dalam pembangunan objek pariwisata adanya potensi serta pengelolaan tempat wisata di setiap daerah yang meliputi mengandalkan daratan yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda, serta hamparan laut

yang sangat luas dengan berbagai potensinya yang bisa bermanfaat secara berkelanjutan sebagai kepentingan pembangunan dan kepentingan ekonomi masyarakat. Menurut Pengelolaan menurut Irawan (dalam Alfiah dkk, 2019) merupakan suatu pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Berbagai potensi tersebut meliputi salah satu aset yang dapat digunakan dengan maksimal dan menyeluruh melalui sektor kepariwisataan. Menurut Wijayanto (dalam Bahiyah 2018) pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Hal tersebut tentunya mampu tercapainya meningkatkan pendapatan nasional dan juga pendapatan daerah dengan tujuan menaikkan tingkat kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Disisi lain juga untuk menyebarluaskan kesempatan berusaha untuk masyarakat, di sisi lain juga dapat membuka lapangan kerja yang baru dengan menyerap masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja yang tujuan akhirnya dapat meminimalisir angka pengangguran dan juga berusaha memaksimalkan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan pariwisata memunculkan spekulasi dampak yang positif dan negatif. Dampak yang positif sendiri memicu adanya

pembangunan dalam sektor wisata dalam hal menaikkan suatu pendapatan yang ada di daerah, terciptanya lapangan kerja yang baru bagi masyarakat daerah, serta dapat menggerakkan suatu kegiatan perekonomian di suatu daerah dan mengembangkan rangsangan pertumbuhan budaya asli di Indonesia serta berdampak pada peningkatan sumber daya manusia. Menurut Evans dkk (dalam Rony 2016) SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor penting dalam meningkatkan sektor pariwisata. SDM dapat berperan penting dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang sangat berpengaruh di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (service-based organization), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja. Namun disisi lain pembangunan pariwisata juga menimbulkan dampak negatif dari beberapa aspek yang masih sering disepelekan bahkan sampai diabaikan, dampak itu meliputi adanya lingkungan yang tercemar, adanya pergeseran norma sosial, serta timbulnya eksploitasi yang berlebihan dalam sektor sumber daya alam dan juga menimbulkan adanya kualitas keaslian yang berubah dalam beragam hayati juga di ekosistem.

Dalam hal ini pembangunan pariwisata terutama di tingkat desa merupakan hal penting untuk menuju pemerataan ekonomi di Indonesia, karena desa sendiri merupakan suatu ujung dari kebangkitan ekonomi dan perihal tentang desa juga merupakan suatu hal yang tidak bisa di lepas dari adanya problematika di Indonesia sendiri. Di samping itu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu “Desa adalah desa dan desa adat

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.’’, Undang-undang nomor 22 tahun 1999 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”. Dalam hal ini maka menimbulkan adanya peluang yang besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk dapat mengembangkan setiap peluang potensi yang dimilikinya secara mandiri dan terstruktur sesuai kebutuhannya masing-masing dalam rangka membangkitkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian desa sendiri dalam hal ini dijelaskan dan dirangkum oleh para ahli, Menurut R. Bintarto Desa adalah wujud adanya geografis yang memunculkan aspek serta unsur fisiografis, ekonomi, sosial, politik seta adanya kulturalisasi setempat dalam pengaruh dalam penghubung timbal balik dengan sektor daerah lain. Dalam lingkup ini dapat diartikan bahwa desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata menjadi satu rangkaian

aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa.

Perkembangan serta pembangunan desa wisata dalam hal ini berdampak langsung bagi ekonomi desa itu sendiri. terlepas dari itu pengelolaan desa wisata tidak bisa dilepaskan dari adanya peran kepala desa sebagai pemimpin desa, dalam hal ini peran kepala desa dengan di bantu masyarakat desa sendiri merupakan peran yang penting dalam menjalankan roda perkembangan desa wisata itu sendiri. Peran sendiri menurut Rivai (dalam Bonita ,2016) merupakan sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu

Menengok kebelakang dengan adanya kemajuan dalam pembangunan desa wisata tidak terlepas dari adanya peran kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin desa yang dimana sebagai pengambil keputusan untuk desanya. Dalam hal ini keterkaitan mengenai kepemimpinan merupakan Menurut Yukl, 1989 Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal: pertama adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisasi; kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan.

Kepemimpinan Kepala Desa Bawuran dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan desa wisata dalam hal ini

mempunyai peran penting dalam kontribusi pembangunan wisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (dalam Purnomo) Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk dapat mempengaruhi suatu kelompok ke arah prestasi dari suatu visi atau sasaran. Puncak Sosok sebagai destinasi yang merupakan wisata baru yang di kelola pada tahun 2017 yang di mana sebelumnya Puncak Sosok merupakan lahan kosong milik kas desa di daerah perbukitan. Perkembangan wisata Puncak Sosok sendiri dalam hal ini membuat kemajuan ekonomi secara tidak langsung bagi warga desa Bawuran yang dimana partisipasi masyarakat yang dibangun untuk mengelola wisata puncak sosok membuat lapangan kerja baru bagi warga desa Bawuran itu sendiri.

Partisipasi masyarakat mengenai pengembangan wisata Puncak Sosok menjadi daya tarik tersendiri pada wisata berbasis masyarakat yang dikenal dengan Jabal Kelor. Hal ini karena yang pertama terdapat masyarakat yang melakukan diskusi bersama dalam memunculkan ide kreatif pada forum pertemuan dimana secara langsung dapat memunculkan sikap percaya diri pada masyarakat itu sendiri, yang kedua adanya sumbangsi Masyarakat dalam bentuk tenaga fisik dimana pengelola tidak mengalami kesulitan dalam mengerahkan warga desa untuk membuat fasilitas wisata seperti meja, kursi, mushola, aula dan toilet, yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam keterampilan dan edukasi dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan

lingkungan jabal kelor, yang terakhir adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda dimana tidak hanya sebatas sumbangan dalam bentuk uang sukarela, tetapi pengelola dan warga menyepakati dengan seluruh bantuan dana desa dan bantuan dana dari lembaga lainnya untuk membangun daya tarik wisata Puncak Sosok (<http://www.haryhermawan.com>).

Dari permasalahan di atas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: Peran Kepemimpinan Kepala Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020) ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai peran Kepala Desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tahun 2019-2020.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengkajian terhadap suatu peran kepemimpinan kepala desa serta peran yang dilakukan oleh pemerintah, selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pola pikir masyarakat dalam pemahaman konsep kepemimpinan, terutama dalam mengetahui peran kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa setempat serta memberikan gambaran kepada masyarakat sejauh mana peran daripada pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut.

D. LITERATUR REVIEW

Tabel 1. 1 Literatur Review

No	Judul	Penulis	Kesimpulan / Temuan
1	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Aziizah Qurrotu Aini	Peran kepemimpinan kepala desa pongok Junaedi Mulyono,SH pengembangan pariwisata menggunakan pendekatan spasial, sektoral, sumber daya masyarakat dan juga teknologi informasi, di samping itu adanya hubungan sosial yang baik dengan masyarakat karena sering melakukan dialog dengan masyarakat sekitar berkaitan dengan masalah atau kendala-kendala yang dihadapi selama pengembangan pariwisata di Desa

No	Judul	Penulis	Kesimpulan / Temuan
			Ponggok dengan di barengi motivasi yang tinggi demi memajukan desda ponggok. Adanya bukti kepedulian terhadap masyarakat Desa Ponggok yaitu dengan menciptakan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri.
2	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa Durai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun	Syahrial	Mayoritas Masyarakat Desa menyatakan baik dengan adanya peran kepemimpinan Kepala desa Durai dimana adanya indikator keteladanan yang baik, kemampuan menjalin komunikasi dua arah, kemampuan membangkitkan motivasi pada masyarakat desa pada kemampuan individu dalam menentukan keputusan desa. Selain itu adanya penilaian mayoritas masyarakat desa Durai diantaranya tumbuhnya sikapinovatif masyarakat desa dalam menerima ide ide baru, tumbuhnya proses perubahan mental berupa adanya kreatifitas serta inisiatif dalam memecahkan permasalahan desa dengan benar dan efisien, serta tumbuhnya motivasi masyarakat desa dalam hal berkarya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Durai.
3	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Wonosoco Kecamatan Undan Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembangunan Desa Yang Berkembang Tahun 2013-2019	Siti Nur Rohmah	Gaya kepemimpinan kepala Desa Setiyo Budi di Desa Wonosoco dengan mengambil keputusan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat, BPD, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dengan di barengi kepemimpinan demokratis yaitu menempatkan perangkat desa yang bekerja untuknya dan masyarakat sebagai faktor utama dan terpenting dalam menjalankan roda kegiatan organisasi yang transparasi dalam hal informasi mengenai anggaran. Adanya sikap komunikasi terbuka

No	Judul	Penulis	Kesimpulan / Temuan
			<p>dengan masyarakat desa dengan mau menerima kritikan dan adanya pertemuan rutin atau rapat, beliau juga merupakan pemimpin yang mau memberi contoh yang baik pada warganya dengan dibarengi meningkatnya kualitas parngkaat desa menjadi lebih baik dalam pelayanannya. Di samping itu adanya pembangunan infrastruktur, potensi desa, dan sumber daya manusia yang baik membuat Desa Wonosoco mendapat penghargaan baik dari Kabupaten maupun Kecamatan</p>
4	<p>Kopetensi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Potensi Desa (Studi Kasus di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)</p>	<p>Saipul Hadi</p>	<p>Kopetensi kepala desa dalam pemberdayaan potensi desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan progam pembangunan fisik seperti pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan drainase, sedangkan pemberdayaan non fisik antara lain adanya pelatihan pengurus karang taruna dan pelatihan kelompok tani. Selain itu kopetensi kepala desa dalam pemberdayaan potensi desa muara madras diantaranya mengikuti pelatihan diaman dapat meningkatkan profesionalitas kerja, lebih efektif dan aktif dalam menjalankan tugasnya dan melahirkan pemikiran dan wawasan baru dengan studi banding keluar daerah dengan adanya penggerak dalam pembangunan baik itu dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial.</p>
5	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Jembangan, Kecamatan</p>	<p>Aditya Agung Nugroho</p>	<p>Kompetensi kepala desa dalam Desa Jembangan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa serta adanya pelatihan kepengurusan karang taruna dan kelompok tani. Di samping itu adanya peningkatan profesionalitas</p>

No	Judul	Penulis	Kesimpulan / Temuan
	Poncowarno, Kabupaten Kebumen)		kerja, lebih efektif dan aktif dalam menjalankan tugasnya dan melahirkan pemikiran dan wawasan baru dengan studi banding keluar daerah dengan adanya penggerak dalam pembangunan baik itu dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial. Selain itu adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa wisata dengan bergotongroyong, meramaikan dengan berdagang, membantu kebersihan, menjadi pekerja, menjaga keamanan. Masyarakat Desa Jembangan melaksanakan partisipasi dalam pembangunan dengan ikut memberi masukan dalam proses pembangunan. Bahkan setiap lima tahun sekali secara rutin diadakan pertemuan antara ketiganya untuk membahas pengembangan Desa wisata Jembanganini. Ini menandakan terjadinya partisipasi yang baik diseluruh lapisan Masyarakat dalam pengembangan Desa wisata Jembangan ini.
6	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Dewi) Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	Krisna Ardhi Wicakson o	Adanya pemberdayaan desa wisata tidak terlepas dari adanya peran partisipasi masyarakat, dimana potensi alam maupun sumber daya masyarakat dapat dimanfaatkan jika partisipasi masyarakat di gunakan sebagai andalan utama demi tercapainya desa wisata yang dapat berkembang dengan baik. Dimana Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang sebagai desa wisata ini juga sesuai dengan tingkatan partisipasi masyarakat meliputi partisipasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi serta

No	Judul	Penulis	Kesimpulan / Temuan
			monitoring
7	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu	Nikita Amalia VGA Andriani Kusuma wati Luchman Hakim	Pengembangan desa wisata di Desa Tulungrejo menggunakan partisipasi masyarakat dimana terhadap pengembangan desa wisata cukup tinggi. Hampir semua masyarakat telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata di Desa Tulungrejo, Masyarakat telah mengerti dan telah sadarwisata dalam ikut serta menciptakan desa wisata yang layak dan siap bersaing di industri pariwisata, di samping itu partisipasi masyarakat memberikan bentuk dalam partisipasi tenaga maupun partisipasi berupa harta yang nantinya untuk pengembangan desa wisata, Pengembangan desa wisata di Desa Tulungrejo menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bagi masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, adanya tambahan pendapatan bagi petani, serta meningkatnya nilai jual buah apel.
8	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman	Eko Murdiyanto	Pengembangan potensi desa wisata karangganeng dalam sejarah memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi serta budaya dan tata ruang bagi berkebangnya desa wisata, adanya kesiapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dengan debarengi anak muda karang taruna menuju desa wisata yang maju nantinya
9	Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, , Tabanan, Bali)	Ni Luh Gede Ratnaningsih Istikomah Mahagannga	Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata diawali dengan dibukanya rumah makan atau restaurant untuk para wisatawan dan adanya perwakilan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata dimana kegiatan itu dilakukan dengan musyawarah bersama dengan saling terbuka membicarakan keinginan bersama mengenai pengembangan desa

No	Judul	Penulis	Kesimpulan / Temuan
			wisata dengan membentuk kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Adanya bentuk atraksi dari partisipasi masyarakat dengan cara terlibat langsung dalam prasarana pengembangan desa wisata dalam menunjang kepariwisataan dengan promosi melalui balhi wibsite serta brosur brosur. Adanaya evaluasi progam kerja bertahap dalam pembangunan desa wisata di harapkan dapat menjadi desa wisata maju nantinya.
10	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang	Aulia Rizki Nabila, Tri Yunining sih	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata kandri Kota Semarang di dasarkan pada 3 kriteria Authentic Participation diantaranya adanya pengambilan keputusan yang menyangkut pada progam pengembangan desa wisat kandri, adanya sumbangsih tertuju pada usaha pengembangan Desa Wisata Kandri dan adanya penerimaan manfaat secara merata

Berdasarkan penjelasan kajian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut yaitu mengenai tema yang diteliti, yaitu mengenai peran kepemimpinan kepala desa dalam desa wisata. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian ini berfokus pada peran kepemimpinan kepala desa dimana sebagai pemimpin desa berkontribusi dalam kinerja pembangunan desa wisata dengan dibantu partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya kerangka teori dapat mempermudah penulis dalam membuat penelitian dalam mengetahui kemana arah penelitian yang akan dilakukan.

1. Peran Kepemimpinan

Menurut Riva (dalam Bonita 2016) peran merupakan sebuah tindakan perilaku di mana tindakan tersebut disengaja yang bertujuan untuk memunculkan harapan dari seseorang dalam posisi tertentu dimana peran disini merupakan aspek yang dinamis dari tingkatan kedudukan seseorang dalam merealisasikan hak serta kewajibanya.

Menurut Arifin (dalam Mulyana 2015) peran kepemimpinan seorang pemimpin dibagi menjadi 6 yaitu :

a. Pematangan atau penyiapan pengikut

Peranan dalam hal ini diartikan sebagai pemberian keterangan yang faktual kepada orang-orang dengan diberikan pendalaman pengertian dalam suatu hal yang dimana bertujuan untuk memunculkan kemauan pemimpin namun selaras dengan akal dan pikiran

b. Human Relation

Peranan dalam hal ini diartikan sebagai pemberian motivasi kepada orang yang dituju untuk mau bergerak dengan di dampingi pemberian bimbingan yang baik dengan suasana kekeluargaan yang mendukung.

c. Menjadi teladan

Peranan dalam hal ini merupakan sebuah figur atau sebagai cerminan bagi orang-orang yang dapat di contoh dalam hal keteladanan dengan menampilkan perilaku dan tutur kata ucapan yang baik serta mampu mengayomi orang-orang sekitar dengan baik.

d. Persuasi dan pemberian perintah

Peranan dalam hal ini dikaitkan dengan adanya kedudukan seorang pemimpin dan masyarakat tidak terikat dengan batas-batas yang jelas sehingga keikutsertaan masyarakat dalam ini tidak ada unsur pemaksaan namun atas kemauan diri sendiri dengan dibarengi rasa tanggungjawabnya sendiri.

e. Penggunaan system komunikasi yang cocok

Peranan dalam ini merupakan sebuah pelaksanaan komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi yang dirasa cocok dalam menyampaikan tujuan ke masyarakat sehingga mampu diterima dengan baik dan mampu memahami maksud dan tujuan secara terstruktur

f. Penyediaan fasilitas

Peranan dalam hal ini adanya pemenuhan fasilitas atau kemudahan oleh seorang pemimpin dalam artian masyarakat dapat memenuhi tujuan dari seorang pemimpin dengan perintah yang jelas oleh seorang pemimpin. Pemberian fasilitas dapat

diuraikan diantaranya pemberian penyediaan anggaran, mengikuti rapat ,pemenuhan perlengkapan alat serta tempat kerja, serta pemberian sifat rangsangan daya tarik untuk masyarakat

Menurut Berry (dalam Saputra 2010) peranan dapat diartikan sebagai:

- a. Peranan Individu merupakan sebuah fungsi dimana dalam menjalankan tugasnya seseorang sebagai makhluk sosial yang berhubungan satu sama lain dengan individu lain atau bisa dikatakan dalam kehidupan antara atasan dan bawahan.
- b. Peranan kelompok merupakan sebuah fungsi dalam menjalankan perannya dibutuhkan dua orang atau lebih dimana dalam hal ini peranan tersebut sebagai pemberi harapan orang lain.

Menurut Adalha Horoepoetri dkk (dalam Husni 2017) menggambarkan dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan

Peran dalam hal ini merupakan munculnya kebijaksanaan yang tepat untuk masyarakat dalam hal menentukan kebijakan tertentu, dalam hal ini kebijakan di ambil dengan menimbang landasan masukan aspirasi masyarakat, di mana kebijakan tersebut nantinya untuk ditaati semua masyarakat.

- b. Peran sebagai strategi

Peran dalam hal ini merupakan munculnya strategi yang baik dengan didampingi dukungan dari masyarakat supaya strategi tersebut dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana.

c. Peran sebagai alat komunikasi

Peran dalam hal ini merupakan alat atau instrumen untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan anggapan bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran dalam hal ini merupakan suatu cara untuk meredam konflik melalui usaha pencapaian kesepakatan pada pendapat pihak yang terkait. Dimana adanya landasan yang mendasari dalam hal bertukar pikiran pada forum diskusi dengan didampingi munculnya toleransi dan sikap saling pengertian satu sama lain dan mengurangi sikap ketidakpercayaan pada pihak anggota lain.

e. Peran sebagai terapi

Peran dalam hal ini merupakan sebuah penyelesaian masalah-masalah psikologis dengan mengobati pada masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan dan tidak percaya diri dengan didukung pemeberian motivasi yang baik pada masyarakat.

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan

memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Moejiono (2002) memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (Compliance Induction Theorist) cenderung memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin.

Karakteristik seorang pemimpin didasarkan pada prinsip-prinsip Stephen R. Covey (dalam Syahril 2010) sebagai berikut :

a. Seorang pemimpin belajar seumur hidup

Dalam hal ini kemampuan pemimpin tidak hanya memiliki pendidikan formal, tetapi juga mempunyai pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk sebagai sumber belajar.

b. Orientasi pada pelayanan

Pemimpin wajib mempunyai prinsip melayani didasarkan pada konsep tujuan yang di mana dalam memberikan layanan, pemimpin harus memberikan pelayanan yang baik.

c. Energi yang positif

Pemimpin dalam kinerjanya harus selalu mempunyai semangat dan energi yang positif, yang didasarkan pada keinginan dan adanya ikhlas dengan mendukung kesuksesan orang lain. Membangun hubungan yang baik haruslah dibutuhkan energi positif dengan

adanya sifat percaya kepada orang lain yang di mana memotivasi kepada bawahannya sehingga dapat bekerja dengan baik, yang dibarengi dengan kepedulian. Selain itu adanya keseimbangan dalam kehidupan pemimpin , dimana dalam menjalankan tugasnya pemimpin juga mempunyai waktu lain selain kerja seperti istirahat ,rekreasi dalam menjalankan kehidupan dunia serta dan kehidupan di akherat seperti manusia lainnya. Di samping itu adanya seorang pemimpin yang dilihat dari kehidupannya sebagai sebuah tantangan yang dimana sebuah tantangan dibutuhkan untukl sebuah kemajuan kinerja dalam hal hal keterampilan ,keberanian serta adanya kebebasan dalam kreatifitas. Sinergi dalam seorang pemimpin juga di butuhkan dimana seorang pemimpin bekerja tidak sendiri melainkan saling menerima masukan dari pihak lain dengan memberikan keuntungan bersama dalam dua belah pihak dengan adanya hasil yang efektif dari bekerja anatar seorang pemimpin sebagai atasan dan staf bawahannya. Yang terakhir adanya pengembangan latihan bagi seorang pemimpin dimana dalam mengembangkan latihan di dasarkan pada komponen yang berhubungan dengan pemahan materi, adanya perluasan materi pengalaman, adanya sifat mau belajar dalam hal materi pada orang lain, prinsip prinsip yang di aplikasikan serta merefleksikan monitoring pada hasil.

Teori kepemimpinan juga jabarkan oleh Robins (dalam Sari 2014) di antaranya sebagai berikut :

1. Teori atribusi kepemimpinan

Dalam hal ini atribusi kepemimpinan diartikan sebagai adanya keputusan tentang suatu hal untuk individu-individu lain.

2. Teori kepemimpinan kharismatik

Dalam hal ini adanya kepemimpinan yang heroik yang luar biasa dalam perihal perilaku yang dilakukan seorang pemimpin.

3. Teori kepemimpinan visioner

Dalam hal ini adanya kepemimpinan atraktif dan terpercaya serta realistik dalam suatu unit organisasi.

4. Teori kepemimpinan transformasional

Dalam hal ini adanya kepemimpinan yang membangun rangsangan intelektual dengan didasarkan pada perimbangan serta memiliki karisma dalam menjalankan tugasnya.

Teori kepemimpinan menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (dalam Wibowo 2017) menyatakan bahwa dalam memimpin terdapat cara dalam menyalurkan kinerjanya diantaranya sebagai berikut :

1. Kepemimpinan direktif, yaitu adanya arah tentang sasaran yang diberikan dalam bentuk cara-cara dengan target secara terperinci tanpa adanya ruang diskusi antar partisipasi pegawai.

2. Kepemimpinan suportif, yaitu penempatan yang diberikan atasan kepada bawahan dalam bentuk dukungan finansial maupun material serta pemberian moral karena adanya ikatan pemimpin dan pegawai seperti persahabatan demi tumbuhnya kesejahteraan antar pegawai.
3. Kepemimpinan partisipatif, yaitu adanya tindakan dengan pengambilan keputusan dengan meminta saran serta masukan pegawai selaku bawahan, namun kewenangan serta keputusan masih dilakukan oleh pemimpin.
4. Kepemimpinan berorientasi prestasi, yaitu adanya kinerja yang lebih bagus yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan kepercayaan yang ditonjolkan pada pegawai untuk menuju kinerja dengan standar yang tinggi.

Di samping itu menurut Yuki dan Slide (dalam Marianti 2009) adanya 4 sifat yang dimiliki seorang pemimpin pada umumnya diantaranya :

1. Kepandaian

Dalam hal ini seorang pemimpin secara garis besar mempunyai kepandaian masing masing dimana kepandaian tersebut cenderung lebih tinggi dibanding bawahannya.

2. Kematangan Atau Kedewasaan

Dalam hal ini adanya elastisitas dalam melakukan suatu pandangan yang terbuka dan mempunyai tingkat kedewasaan dalam menghadapi suatu masalah yang terjadi

3. Dorongan berprestasi

Dalam hal ini adanya tuntutan keberhasilan yang diorientasikan pada suatu hasil yang di mana dalam melakukannya dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga adanya pemberian semangat dan motivasi pada bawahannya .

4. Integritas

Dalam hal ini adanya penyesuaian yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan apa yang di kataksnya dengan bertumpu pada nilai nilai yang sudah ditetapkan dengan di sejajarkan pada kejujuran yang berlaku.

Beberapa teori dan model kepemimpinan diantaranya :

1. Teori sifat kepemimpinan

teori yang berusaha mengimplementasikan sebuah karakteristik dalam hal hal mental fisik kepribadian yang disalurkan pada keberhasilan pemimpin, dimana mengandalkan pada suatu penelitian yang menggabungkan berbagai karakter sifat dengan kriteria tertentu.

2. Teori pribadi perilaku kepemimpinan

Teori yang berusaha mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana seseorang berperilaku menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang dari berusaha menemukan sifat-sifat, mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi klan kepuasan dari pengikut-pengikutnya.

3. Teori kepemimpinan situasional

Teori yang berusaha terhadap menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.

Secara operasional fungsi kepemimpinan menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (dalam Aulia, 2015) dibagi menjadi 5 diantaranya :

a. Fungsi intruksi

Fungsi intruksi merupakan komunikasi yang bersifat satu arah dalam artian pemimpin sebagai komunikator dimana seorang pemimpin menentukan dimana dan bagaimana dan bila mana perintah itu diintruksikan dan dapat dijalankan secara efektif. Di samping itu adanya dorongan motivasi orang lain yang diberikan oleh pemimpin agar dapat melaksanakan perintah yang sesuai.

b. Fungsi konsultasi

Fungsi konsultasi merupakan komunikasi yang bersifat dua arah dalam artian adanya penetapan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin yang mempertimbangkan aspek serta bahan yang di mana orang orang yang di pimpin memiliki aspek yang diperlukan dalam menetapkan keputusan serta adanya umpan

balik yaitu untuk memperbaiki atau menyempurnakan satu keputusan yang diambil oleh pemimpin.

c. Fungsi partisipasi

Fungsi partisipasi merupakan fungsi yang sifatnya membangkitkan orang-orang yang dipimpinnya dimana adanya partisipasi keikutsertaan dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini partisipasi yang dilakukan bukan hanya semena-mena namun dilakukan dengan struktur yang jelas dan terkendali dengan melakukan proses kerja sama dengan program kerja masing-masing.

d. Fungsi delegasi

Fungsi delegasi merupakan adanya pemberian pelimpahan wewenang dalam menetapkan keputusan baik melewati persetujuan dari atasan dengan dasar atas kepercayaan dari orang-orang yang sudah memiliki prinsip yang sama dalam konteks persepsi maupun aspirasi.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian merupakan proses kepemimpinan dimana dalam hal ini adanya sistem pengaturan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpin secara efektif dan terorganisir serta adanya kegiatan bimbingan seperti pengawasan, koordinasi, serta pengarahan untuk memungkinkan terwujudnya tujuan bersama secara maksimal.

Dalam hal ini menurut Challagalla, dan Shervani (dalam Felicia Dewi 2006) merupakan adanya kecapakan dan monitoring dalam hal keahlian maupun kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, memberikan arahan serta bimbingan dengan tujuan perbaikan yang dibutuhkan, yang pada akhirnya nantinya akan diberikan reward berupa hadiah atau hukuman kepada para pegawai atas tingkat dasar keahlian serta kemampuan pegawai.

2. Pengelolaan Wisata

Pengelolaan Menurut Malayu Hasibuan (dalam Sidiq 2015) adalah sebuah seni maupun ilmu yang dimana mengatur sebuah proses dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan keefektifan serta keefesienan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Terry (dalam Sidiq 2015) fungsi pengelolaan yaitu :

a. Perencanaan (planning)

Sebuah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (organization)

Sebuah cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakan (actuating)

Organisasi yang bergerak agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (controlling)

Sebuah gerakan yang diawasi dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. dirasakan atau didapat konsumen secara langsung.

Menurut Cooper 1993 (dalam Alfiah.S, dkk 2019) sebelum mengembangkan desa wisata, terlebih dahulu harus memperhatikan aspek 4 A, yaitu:

- a. *Attraction* merupakan suatu produk utama yang damana berkaitan dengan apa yang di dapat oleh wisatawan yaitu dalam suatu yang dilihat atau yang diarasakam, hal tersebut dartikan sebagai suatu keunikan maupun keindahan alam atau lokasi yang dapat

diabadikan dari foto , atau sebagai sarana permainan, serta dapat juga sebagai tempat peninggalan sejarah yang dianggap sebagai legenda oleh penduduk lokal dan juga terdapat hal yang menarik seperti adanya pertunjukan adat yang dalam hal atraksi yang di tontonkan serta upacara adat serta budaya local yang dapat menjadi daya tarik bagi wisata luar daerah maupun luar internasional.

- b. *Accessibility* adalah startegi infrastruktur dalam mendampingi suatu lokasi btersebut. adanya transportasi, berupa jalan sebagai penunjuk arah menuju lokasi yang dituju, Di samping itu adanya pembangunan jalan sebagai sarana perbaikan juga sangat penting dilakukan karena dengan adanya banyak wisatawan yang datang juga dapat memudahkan untuk menuju tempat wisata dan juga menimbulkan suatu kepuasan bagi wisatawan karena tidak hanya wisatanya yang indah juga transpertasi yang bagus dan membuat tidak segan wisatawan dapat datang lagio ke tempat wisata tersebut.
- c. *Amenity* dapat dijelaskan sebagai suatu pendukung dalam sarana perlengkapan fasilitas dalam lokasi wisata. Desa wisata dalam hal ini dapat menyediakan tempat *home stay* atau penginapan selama di lokasi, di samping itu adanya penyediaan warung makanan yang dijual untuk para wisatawan yang datang, tempat parkir untuk kendaraan wisatawan yang datang juga adanya fasilitas tambahan

untuk sara beribadah bagi wisatawan. Penerapan jumlah fasilitas umum tersebut juga diharapkan dapat memetakan lokasi dengan tepat karena jika tidak tepat dapat mengganggu kekhasan wisata yang dinikmati oleh para wisatawan.

- d. *Ancillary* merupakan suatu komitmen partisipasi orang-orang yang terjun dan mengurus langsung mengelola lokasi desa wisata. Dalam hal ini pengelolaan wisata dengan dasar komitmen dapat menjadikan lokasi wisata menjadi seperti yang diharapkan juga membuat para wisatawan yang datang berkunjung dapat menikmati keindahan atau keunikan wisata tersebut dan diharapkan bukan sekedar berkunjung tapi dapat melekat di hati para wisatawan.

Menurut Jejen Tajudin 2018 Desa wisata dalam hal pengelolaan wisata terdapat pemenuhan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kelembagaan, di mana terdapat suatu rencana tahap awal yang tepat dalam kegiatan khususnya penentuan yang tepat dalam POKDARWIS dengan adanya keterampilan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata seperti tata kelola fasilitas umum, adanya pelatihan untuk para masyarakat desa sebagai penggerak wisata serta adanya pembuatan struktur yang tepat dan tersusun dalam pengelolaan wisata.
- b. Objek wisata sebagai tujuan daya tarik bagi wisatawan dengan sistem menggalakan potensi wisata oleh masyarakat desa sebagai

tuan rumah ke luar daerah dalam hal memperkenalkan pesona dan keindahan wisata yang sudah dikembangkan.

- c. Adanya peran pemerintah sebagai pengarah dan pemberi prasarana dalam pengembangan sarana pendukung ataupun komponen yang untuk kelengkapan pengembangan wisata, yang dimana hal tersebut merupakan komponen utama dalam sebuah akomodasi, atraksi, fasilitas pendukung serta infrastruktur juga adanya kerja sama dengan mitra sebagai pihak pendukung pengembangan wisata tersebut.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Peran

Peran adalah posisi seseorang itu berada, dimana posisi tersebut mempunyai tanggung jawab tersendiri untuk menjalankan suatu hal dalam lingkup individu maupun lingkup kelompok.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu sifat maupun perilaku yang dimiliki seorang individu dimana individu tersebut mempunyai tanggung jawab lebih untuk mengatur bawahan dalam hal melaksanakan tugasnya.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah tahapan kegiatan yang sifatnya disengaja dengan adanya struktur konsep yang dirancang sedemikian rupa pada hal atau objek yang sudah di tentukan.

4. Desa Wisata

Desa wisata adalah pengembangan desa di mana desa tersebut mempunyai potensi wisata yang menarik jika dilihat oleh pengunjung dengan di lengkapi fasilitas yang memadai.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Adapun definisi oprasional yang dilakukan oleh penelitian ini mengenai peran kepemimpinan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pengelolaan desa wisata sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan kepala desa dalam desa wisata
 - Kesesuaian kebijakan pada peraturan kepala desa dalam mengembangkan desa wisata.
 - Kesesuaian pemberian kewenangan kepala desa dalam mengembangkan desa wisata.
 - Ketepatan struktur tugas dan fungsi yang diberikan kepala desa dalam mengembangkan desa wisata.
- b. Peran sebagai strategi kepala desa dalam desa wistaa
 - Strategi yang dilakukan
 - Rencana yang diharapkan
- c. Peran sebagai alat komunikasi kepala desa dalam desa wisata
 - Penyerapan aspirasi masyarakat
 - Komunikasi yang dilakukan
 - Proses pengambilan keputusan

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa kepala desa dalam desa wisata
 - Memimpin rapat karang taruna, perangkat desa, dll
 - Penyelesaian konflik
- e. Peran sebagai terapi bagi masyarakat desa.
 - Pemberian motivasi
 - Pemberian bimbingan
 - Pemberian pengarahan

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Ketika melakukan penelitian adakalanya dapat membuat suatu tahapan-tahapan tersebut dapat membuat penelitian kita menjadi terarah dan dapat dipahami dengan baik, tahapan tersebut dapat menggunakan alat yang di sebut metode. Menurut Rosdy Ruslan, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah saling terhubung melalui sistem cara kerja dengan memahami suatu subjek maupun objek penelitian dalam strategi menemukan suatu jawaban secara ilmiah dan keaslian dari sesuatu yang diteliti. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2011:5) yaitu metode penelitian kualitatif berupa metode yang berdasarkan ilmu filsafat yang postpositivisme yang gunanya untuk meneliti kondisi obyek alamiah atau sebagai lawannya eksperimen peneliti dalam institusi terpenting. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara memilih sampel dan wawancara, teknik

pengumpulan dengan teknik pemeriksaan keaslian data, gabungan analisis data yang bersifat induktif maupun kualitatif, dan hasil metode kualitatif tersebut lebih ditekankan makna dari pada proses berfikir untuk membentuk kesimpulan umum melalui suatu kejadian.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mengambil metode ilmiah untuk memaparkan objek kejadian atau serangkaian fenomena menggunakan deskripsi data maupun fakta kejadian melalui kata-kata secara keseluruhan pada suatu subjek yang sedang diteliti (Mulyana, 2008:151). Maleong juga menyatakan bahwa metode penelitian dapat di defenisikan pada suatu yang ilmiah dengan bertujuan sebagai pemahaman suatu fenomena kejadian dalam lingkup konteks sosial secara ilmiah dengan mengutamakan konteks sebuah proses interaksi komunikasi yang terjalin secara mendalam antara peneliti dengan yang diteliti.

Penelitian tentang peran kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan desa wisata studi kasus desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul merupakan suatu objek kasus yang baiknya menggunakan metode kualitatif, karena metode kualitatif adalah penelitian berupa pola investigasi dengan data dan pernyataan didapatkan melalui hasil wawancara langsung dengan peneliti yaitu objek untuk di teliti dan sebagian orangda lam lingkup tempat penelitian tersebut. Dengan itu kita dapat menerima hasil yang autentik berdasarkan fakta. Disamping itu teknik pengumpulan data

penelitian dapat dilakukan dengan berbagai tahap seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keseluruhan teknik pengumpulan data tersebut dapat membantu bagaimana fakta yang terjadi di lapangan pada peran kepemimpinan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa Bawuran dalam meningkatkan desa wisata, melalui teknik pengumpulan data penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa yang diambil untuk nantinya partisipasi masyarakat Desa Bawuran dapat diciptakan untuk membangun desa wisata Puncak Sosok tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi wisata Puncak Sosok di Dusun Jambon RT 04, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan dan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini karena dianggap mampu dan dapat memberikan berbagai macam penjelasan, gambaran dan pemaparan terkait dengan penelitian.

3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan berbagai informasi dari informan yang ditemui dilapangan pada saat melakukan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bawuran, Ketua POKDARWIS, Anggota POKDARWIS, Pengunjung Puncak Sosok, Penjual makanan serta orang lain yang dianggap mampu dan cakap sesuai dengan topik penelitian yang diangkat.

4. Jenis Data Penelitian

Terdapat 2 jenis data yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu penggunaan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diterima oleh peneliti langsung atau (tangan pertama) dalam memperoleh data yang dicari (Istijanto, 2005). Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data primer yang dimaksud adalah jawaban atas pertanyaan dan pendapat informan yang dianggap mampu dan sesuai dengan topik penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung atau data kedua yang diperoleh peneliti dilapangan. Data sekunder diberikan oleh pihak-pihak terkait berupa informasi sekilas (Istijanto, 2005). Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku terkait, jurnal, arsip, peraturan atau undangundang, media masa, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dapat diterapkan pada peran kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan wisata tersebut mempunyai tahap-tahap di mana tahap tersebut sangat penting satu samalain, seperti pertama yaitu observasi yang merupakan metode dasar untuk mendapatkan data pada penelitian kualitatif. Observasi kualitatif sifatnya lebih umum dibandingkan dengan observasi kuantitatif yang sifatnya lebih terstruktur dan tersistematis. Tujuan dari observasi dalam penelitian kualitatif adalah dapat mencermati perilaku subyek dengan apa adanya secara mendalam, berbeda dengan observasi kuantitatif yang dibatasi adanya observasi pada ringkasan biasanya berupa nominal angka dalam pengamatan subyek penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan subyek yang diteliti dalam kondisi yang alami. Seperti di bagaimana kepemimpinan kepala desa yang dilakukan kita bisa tahu situasi kondisi tempat tersebut.

Yang kedua adalah yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dengan disengaja untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat mengarahkan pada makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara secara langsung tersebut kita dapat memperoleh jawaban yang valid karena data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang bersangkutan dan tentunya data tersebut adalah data

yang sesuai fakta kejadian yang telah terjadi, dengan wawancara mendalam kita bisa tahu bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan desa wisata dan bagaimana peran partisipasi masyarakat sebagai roda penggerak dalam peningkatan pembangunan wisata yang baik dan terstruktur. Di mana dalam hal ini peneliti akan mewawancarai diantaranya Kepala Desa, ketua POKDARWIS dan anggota POKDARWIS.

Yang ketiga dengan Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah lama maupun yang baru terjadi. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar kejadian, atau karya seseorang. Penjelasan dari dokumentasi sendiri ialah penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif secara lengkap. Pada awalnya, dokumentasi digunakan sebagai bukti kuat hasil penelitian kualitatif supaya lebih bisa dipercaya, dengan dokumentasi kita dapat mempunyai landasan data yang kuat dalam kasus tersebut dan dengan dokumentasi penelitian kasus tersebut juga menjadi lebih jelas.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2012: 89) merupakan suatu adanya progres dalam menyusun dan mencari data dengan berurutan dan data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dengan dokumentasi, yaitu cara penyusunan data dalam bentuk kategori, memaparkan dalam setiap unit analisis, melakukan

penggabungan, menyusun ke dalam suatu pola dengan memilih yang paling penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan dengan tujuan mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono) menjelaskan terdapat 3 tahapan dalam teknik analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data menurut sugiyono (2012: 93) yaitu merangkum serta memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal yang penting, pencarian pola serta temanya. Sehingga data yang sudah selesai direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data oleh peneliti dan untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

b. Display data

Display data menurut Miles and Huberman (Sugiyono 2012: 95) yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks yang sifatnya naratif yang bertujuan untuk mempermudah serta dapat dipahami dengan cermat apa yang terjadi, dan melakukan kerja selanjutnya yang didasarkan apa yang telah dicermati tersebut.

c. Verifikasi data

Verifikasi data pada analisis kualitatif merupakan pembuatan kesimpulan yang dimana melalui tahap awal penelitian yang sudah di dukung bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam pengumpulan data-data penelitian di lapangan yang dimana dapat menjadi kesimpulan penelitian yang kredibel.

